

Model Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan PKB Penyelia Kabupaten Sumedang

Aldina Sukmawardhani

BKKBN

e-mail: aldinasukmawardhnigmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi, menyusun model analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (AKD) PKB penyelia serta menetapkan jenis pelatihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh PKB penyelia Kabupaten Sumedang adalah penyusunan materi monitoring, dan evaluasi program KB sedangkan, unjuk kerja yang belum dapat dilaksanakan ialah pengembangan media advokasi, KIE dan konseling KB. Model AKD PKB Penyelia disusun berdasarkan Permenpan. RB nomor 21 tahun 2018 tentang jabatan fungsional PKB dan Perka. BKKBN nomor 2 tahun 2017 tentang standar kompetensi PKB. Jenis pelatihan yang dapat diberikan kepada PKB penyelia kabupaten sumedang ialah pelatihan pengembangan media KIE kekinian serta pelatihan advokasi berbasis bukti. Saran dalam penelitian ini ialah menyelenggarakan pelatihan penyusunan media KIE, penyuluhan dan konseling KB bagi PKB penyelia kabupaten sumedang serta menyusun kurikulum teknis fungsional untuk memfasilitasi kebutuhan pelatihan bagi PKB Penyelia di Kabupaten Sumedang oleh Bidang pelatihan dan pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci : analisis kebutuhan diklat; pkb; kompetensi

Training Needs Analysis Model for Family Planning Extension Supervisors (PKB) in Sumedang District

Abstract

This research aims to analyze the performance of family planning extension supervisors (PKB) in Sumedang District, develop a training needs analysis model (AKD) for PKB supervisors, and determine the types of required training. It employed a qualitative method. Based on the analysis results, it was concluded by PKB supervisors in Sumedang District was the preparation of monitoring materials, and family planning program evaluation. The job that had not been performed included the development of advocating media, and family planning counseling, communication, information and education. The training needs analysis model for PKB supervisors is based on the Permenpan. RB No. 21 of 2018 concerning the functional positions of PKB and Perka. BKKBN No. 2 of 2017 concerning PKB competency standards. The training that is recommended to be given to PKB supervisors in Sumedang District consists of the training on the current Information Education and Communication media and evidence-based advocacy training. Suggestions in this study are to conduct IEC media preparation training, family planning counseling, and counseling for PKB supervisors in Sumedang Regency and develop a functional technical curriculum to facilitate training needs for PKB Supervisors in Sumedang Regency with the field of training and development of BKKBN representatives in West Java Province.

A. PENDAHULUAN

Analisis kebutuhan pelatihan merupakan proses untuk mengetahui kesenjangan antara keadaan yang sebenarnya (*actual condition*) dengan kondisi yang diinginkan (*ideal condition*) yang menyangkut kinerja sumber daya manusia dalam organisasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Rahman (2017) menyimpulkan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan manajemen BKKBN tahun 2014-2017 tidak dilaksanakan secara konsisten dan tidak sesuai prinsip merancang program pendidikan dan pelatihan model ADDIE sehingga perencanaan program pendidikan dan pelatihan tidak mencerminkan upaya peningkatan kompetensi pegawai. Hal tersebut sejalan dengan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan BKKBN pada tahun 2018 dimana 69% PKB masuk dalam kategori tindak lanjut pengembangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kompetensi penyuluh keluarga berencana (PKB) penyelia di kabupaten sumedang dalam melaksanakan unjuk kerja sesuai dengan peraturan kepala BKKBN Nomor 2 Tahun 2017?
2. Bagaimana model analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi PKB jenjang jabatan penyelia berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 21 Tahun 2018 dan peraturan kepala BKKBN Nomor 2 Tahun 2017?
3. Jenis pelatihan apa yang dibutuhkan oleh PKB penyelia di kabupaten sumedang berdasarkan peraturan kepala BKKBN nomor 2 Tahun 2017 tentang standar kompetensi PKB?

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis kompetensi pelaksanaan unjuk kerja bagi penyuluhan keluarga berencana (PKB) jenjang jabatan penyelia di Kabupaten Sumedang berdasarkan standar kompetensi PKB Penyelia pada peraturan kepala BKKBN nomor 2 tahun 2017.
2. Merancang model analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi PKB jenjang jabatan penyelia berdasarkan uraian tugas jabatan pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 21 Tahun 2018 serta standar kompetensi dalam

peraturan kepala BKKBN nomor 2 Tahun 2017.

3. Menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh PKB penyelia di Kabupaten Sumedang berdasarkan standar kompetensi PKB penyelia sesuai dengan peraturan kepala BKKBN nomor 2 Tahun 2017.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan Permenpan nomor 21 tahun 2018 tentang jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana, Penyuluh KB merupakan PNS yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program KKBPK. Adapun standar kompetensi bagi PKB telah ditetapkan dalam Perka BKKBN nomor 2 tahun 2017 tentang standar kompetensi penyuluh keluarga berencana.

Standar kompetensi yang ditetapkan bagi PKB merupakan persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat terkait karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Kompetensi tersebut ialah

4.2.1 Kompetensi Pendataan Keluarga

Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan PKB dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan Keluarga, dan data Anggota Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN). Kemampuan ini diukur berdasarkan 8 (delapan) kriteria unjuk kerja. Disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi pendataan keluarga ialah unit kompetensi dalam menyusun laporan updating pendataan keluarga dan menyusun laporan dan menyusun hasil rekapitulasi pendataan keluarga.

4.2.2 Kompetensi Peta Keluarga

Kompetensi ini merupakan kegiatan setelah melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga. Peta Keluarga ini merupakan alat bantu bagi PKB dalam pemetaan operasional program KKBPB berdasarkan kesertaan ber-KB, tahapan keluarga sejahtera masing-masing keluarga, dibuat di tingkat RT atau RW/dusun. Dapat disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah melakukan validasi terkait peta keluarga yang telah dibuat bersama kader di wilayah kerjanya serta menyusun laporan pembuatan peta keluarga untuk disampaikan kepada UPT dan laporan statistic rutin

4.2.3 Kompetensi Penyebarluasan Hasil Pendataan Keluarga

Penyebarluasan hasil pendataan keluarga merupakan kegiatan dalam upaya pemanfaatan hasil pendataan keluarga melalui kegiatan diseminasi pendataan keluarga di tingkat kecamatan dengan sektor terkait dengan menggunakan hasil pengolahan dan analisis pendataan keluarga.. Adapun kesimpulan untuk nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah melakukan analisa hasil pendataan keluarga dan pemanfaatan hasil pendataan keluarga bagi mitra atau pihak terkait

4.2.4 Kompetensi Menyusun Materi KIE, Konseling dan Advokasi

Kegiatan KIE atau Komunikasi, Informasi dan Edukasi merupakan kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga, masyarakat, dan penduduk dalam Program KB. Adapun kesimpulan untuk nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah menyiapkan saran dan prasarana dalam melaksanakan advokasi, KIE dan konseling KB seperti mobil pelayanans serta memahami pedoman dan peraturan- peraturan terkait pelaksanaan advokasi, KIE dan konseling KB

4.2.5 Kompetensi Menyiapkan Alat dan Bahan untuk Pengembangan Media Advokasi, KIE dan Konseling KB

merupakan rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan advokasi, KIE dan konseling sesuai dengan tugas fungsi PKB. kompetensi ini dibangun melalui 3 (tiga) unjuk kerja. kesimpulan untuk nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah memahami teknik dan metode pengembangan media KIE dan konseling KB.

4.2.6 Kompetensi Pengembangan Media

Advokasi, KIE dan Konseling KB

Pengembangan media Advokasi, KIE dan Konseling merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh PKB dalam rangka mempromosikan program KB di lapangan secara lengkap kepada sasaran sesuai dengan fakta yang dihadapinya. Disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah memahami teknik dan metode pengembangan media advokasi, KIE dan konseling KB serta menentukan sasaran dalam melakukan KIE dan konseling KB.

4.2.7 Kompetensi Konseling KB

Dapat disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah memberikan rekomdeasi terhadap permasalahan umum yang disampaikan oleh sasaran konseling KB.

4.2.8 Kompetensi Penyiapan Pembentukan Kelompok Kegiatan

Disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah menginisiasi dan memfasilitasi penetapan jadwal kegiatan poktan (penyusunan jadwal kegiatan poktan yang dilakukan selama ini mengikuti jadwal posyandu atau PAUD).

4.2.9. Kompetensi Pembentukan Kelompok Kegiatan

Disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah menginventarisir peta sasaran untuk mengetahui potensi, sasaran, dan kebutuhan masyarakat serta menyusun laporan fasilitasi pembentukan.

4.2.10 Kompetensi Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina - Bina

Disimpulkan bahwa bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah melaksanakan pembinaan melalui pertemuan dan kunjungan langsung ke kelompok bina - bina, mengidentifikasi peta dan sasaran kelompok bina-bina (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M, dan UPPKS serta melakukan identifikasi kegiatan bina-bina (BKB, BKR, BKL), PIKR/M, dan UPPKS diidentifikasi sesuai dengan petunjuk teknis pembinaan kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL.

4.2.11 Kompetensi Pencatatan dan Pelaporan Kelompok Kegiatan

Disimpulkan bahwa informan dalam kompetensi ini melalui unjuk kerja yang dilaksanakan telah memiliki kemampuan dalam menyusun jadwal kegiatan secara rutin sesuai dengan kebutuhan sasaran pedoman monitoring dan evaluasi

program KKBPK serta menyiapkan bahan (data, kuisioner, pedoman teknis dan operasional) yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi

4.2.12 Kompetensi Menyiapkan Materi Kelompok Kegiatan

Disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah menyiapkan lembar balik/ABPK dalam melaksanakan konseling serta menyusun outline terkait materi yang akan disampaikan serta menyusun pointer sesuai dengan sasaran poktan.

4.2.13 Kompetensi Menyiapkan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK

Disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini ada pada unit kompetensi melaksanakan monitoring dan evaluasi program KKBPK belum sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan yaitu memahami pedoman monitoring dan evaluasi program KKBPK serta menyiapkan bahan (data, kuisioner, pedoman teknis dan operasional) yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

4.2.14 Kompetensi Penyusunan Materi Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK

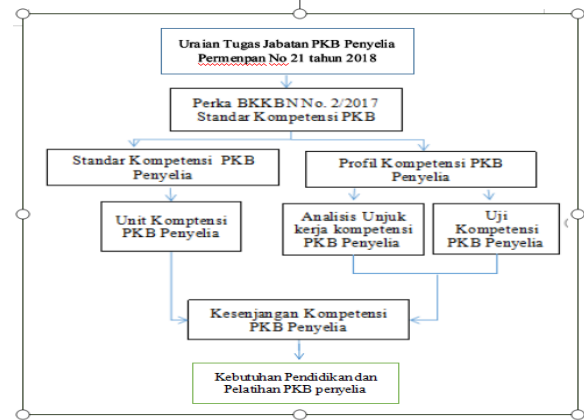
Disimpulkan bahwa dalam kompetensi ini unjuk kerja yang dilakukan informan hanya terbatas pada pengisian pencapaian program KKBPK diisi di dalam format instrumen monitoring dan evaluasi Program KKBPK yaitu pencatatan dan pelaporan dalam pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi

4.2.15 Kompetensi Menyiapkan Raker/Rakor Program KKBPK

disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini ada pada unit kompetensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan rapat koordinasi program KB.

Berdasarkan hasil analisis dari 21 informan PKB Penyelia Kab sumedang terhadap kesenjangan ke 15 kompetensi tugas jabatan dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh informan berada di bawah standar kompetensi terutama pada kompetensi pengembangan media advokasi, KIE dan konseling KB dimana sebagian informan tidak melaksanakan unjuk kerja dalam kompetensi tersebut. Adapun kompetensi yang cukup dimiliki oleh responden adalah pencatatan dan pelaporan kelompok kegiatan.

4.3 Model Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan PKB Penyelia



Model ini menjelaskan bahwa dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi PKB jenjang jabatan penyelia diawali dengan menetapkan uraian tugas jabatan melalui standar kinerja PKB sesuai dengan Permenpan nomor 21 tahun 2018 tentang jabatan fungsional penyuluh keluarga serta menentukan standar kompetensi PKB jenjang jabatan penyelia berdasarkan Perka BKKBN nomor 2 tahun 2017 tentang standar kompetensi PKB.

4.4 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan bagi PKB Penyelia Kabupaten Sumedang

Unit Kompetensi	Unjuk Kerja Kompetensi/Elemen Kompetensi	Pengembangan Substansi	Jenis Pelatihan
Pengorganisasian dan Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina - Bina	Updating data Kelompok Bina- bina (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M, dan UPPKS dilakukan; Peta dan Sasaran Kelompok Binabina (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M, dan UPPKS diidentifikasi;	Pencatan dan Pelaporan Program Pembangunan Keluarga Pengembangan Program Pembangunan Keluarga	Refreshing PKB Latihan Dasar Umum (LDU)
	Bina-bina (BKB, BKR, BKL), PIK/R/M, dan UPPKS diidentifikasi;	Pengembangan Program Pembangunan Keluarga	Latihan Dasar Umum (LDU)
	Pembinaan melalui pertemuan dan kunjungan langsung ke kelompok bina - bina	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga	Latihan Dasar Umum (LDU)
	Penyusunan kegiatan bina-bina, sasaran dan target difasilitasi	Pengembangan Program Pembangunan Keluarga	Refreshing PKB
	Identifikasi Masalah dan rekomendasi/ solusi yang harus dilakukan pada masing-masing kelompok difasilitasi	Refreshing Program Pembangunan Keluarga	Advokasi berbasis bukti
	Koordinasi dengan pihak terkait (bidan, dokter, kader, RT/ RW, PPKBD, PKK, Babinsa, Puskesmas) dalam rangka rencana penyuluhan dilakukan;	Refreshing Program Pembangunan Keluarga	Behavior Change Communication (BCC)

Kompetensi dengan nilai gap tertinggi dan perlu ditindaklanjuti melalui pelatihan bagi PKB Penyelia kabupaten sumedang ada pada kategori advokasi, KIE dan konseling KB dengan jenis kompetensi menyiapkan alat dan bahan untuk pengembangan media advokasi, KIE dan konseling KB serta mengembangkan media advokasi, KIE dan konseling KB. Usulan

pengembangan kompetensi yang dapat diberikan sebagai prioritas intervensi dalam memperkecil gap kompetensi tersebut ialah pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan media kekinian dan advokasi berbasis bukti.

Kompetensi berikutnya yang perlu dikembangkan oleh para PKB Penyelia di kabupaten sumedang ialah pengorganisasian dan pengelolaan kelompok kegiatan bina - bina, adapun intervensi yang dapat diberikan untuk mengurangi kesenjangan tersebut diantaranya ialah memberikan materi teknis terkait pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, pengembangan program pembangunan keluarga, dan pengelolaan program pembangunan keluarga

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan terkait penyusunan model analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi PKB penyelia Kabupaten Sumedang, kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis kompetensi pelaksanaan unjuk kerja bagi PKB penyelia di Kabupaten Sumedang berdasarkan hasil pengukuran kesenjangan kompetensi memberikan gambaran bahwa, kompetensi penyusunan materi monitoring dan evaluasi program KB, pengembangan media advokasi, KIE dan konseling KB serta pengelolaan kelompok ketahanan keluarga memiliki rentang nilai yang paling tinggi. Sedangkan kesenjangan kompetensi yang paling rendah ada pada kompetensi penyusunan materi kegiatan monitoring dan evaluasi program KB serta kompetensi pencatatan dan pelaporan kelompok kegiatan ketahanan keluarga.
2. Model analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi PKB penyelia disusun melalui pengukuran kesenjangan kompetensi dengan menetapkan uraian tugas jabatan pada Permenpan. nomor 21 tahun 2018 untuk kemudian menetapkan standar kompetensi PKB penyelia yang dibandingkan dengan profil PKB berdasarkan Perka. BKKBN nomor 2 tahun 2017.
3. Pelatihan yang bagi PKB penyelia Kabupaten Sumedang berdasarkan penilaian unjuk kerja pada kesenjangan

kompetensi serta usulan pengembangan kompetensi berdasarkan substansi (materi) dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kerja adalah pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan media KIE kekinian dan advokasi berbasis bukti. Pengembangan kompetensi yang bersifat *off the job training* ini didasarkan pada keterbatasan kemampuan OPD KB kabupaten/kota dalam melaksanakan mentoring dan coaching secara teknis di lapangan.

5.2 Saran

Dalam rangka pengembangan penelitian ke tahap selanjutnya, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelatihan penyusunan media KIE, penyuluhan dan konseling KB bagi PKB penyelia kabupaten sumedang oleh Bidang pelatihan dan pengembangan perwakilan BKKBN provinsi jawa barat
2. Menyusun kurikulum teknis fungsional oleh Bidang pelatihan dan pengembangan Perwakilan Jawa Barat untuk memfasilitasi kebutuhan pelatihan bagi PKB Penyelia di Kabupaten Sumedang.
3. Mengembangkan model analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan PKB penyelia untuk mengukur kesenjangan kompetensi manajerial dan kesenjangan kompetensi sosiokultural berdasarkan Perka BKKBN nomor 2 tahun 2018.
4. Melaksanakan uji coba kelayakan terhadap aplikasi AKD PKB Penyelia berbasis *android*.

REFERENSI

- Bakar,R. Jufri,M,. 2019. Analisis Kebutuhan dan Rancangan Pelatihan. Yogyakarta: Ombak
- Creswell, John W. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition. London. Sage Publication
- Danim, S. 2007. Metode Penelitian untuk Ilmu - Ilmu Perilaku. Jakarta: Bumi Aksara
- Kaswan.2013. Pelatihan dan Pengembangan Untuk Meningkatkan Kinerja SDM. Bandung: Alfabetha
- Lubis,L. Manaf,A, Ahmad,M. Abdullah,M dan Junoh, M. 2019. Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial. Ed.I. Yogyakarta: Andi
- Mulyadi. Deddy, 2015. Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfabeta
- Notoatmodjo, S. 2015. Pengembangan Sumber

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi Era Society 5.0

- Daya Manusia. C.t.V. Jakarta: Rineka Cipta
- Sujarweni Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) Bandung: Alfabetha
- Sedarmayanti. 2017. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja. Ed.I Bandung: Refika Aditama
- Sagian. P. Sondang,. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Sofo, Francesco. 1999. Human Resources Development, Perspective, Roles and Practice Choices. Warriewood-Australia: Bussines and Professional Publishing
- Spencer, Lyle M. & Spencer, Signe M. 1993, Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: John Wiley & Sons, Inc
- Wibowo, 2016, Manajemen Kinerja, Jakarta: ed.2, RajaGrafindo Persada
- Yin, Robert K. 2009. Case Study Reserch: Design and Methods. California: Sage Publication
- Zainal.V. et al.2015. Manajemen Sumberdaya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: ed.3, Raja Grafindo Persada
- Zwell, Michael. 2000. Creating a Culture of Competence. New York: Willey & Sons